

KESANTUNAN BERBAHASA PADA TUTURAN ANGGOTA DPR TERKAIT ISU TUNJANGAN DAN DEMONSTRASI 2025 (KAJIAN PRAGMATIK)

LANGUAGE POLITENESS IN THE SPEECHES OF DPR MEMBERS REGARDING THE 2025 ALLOWANCE AND PROTEST ISSUES (A PRAGMATIC STUDY)

Ira Maulidia^{*1)}, Sri Mulyani²⁾

¹Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Timur, Indonesia, iramaulidia123@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Timur, Indonesia, srimulyani@uhamka.ac.id

**Correspondence to: iramaulidia123@gmail.com*

Article History:	Received	Revision	Accepted	Published
	May 15, 2026	May 28, 2026	June 24, 2026	June 28, 2026

Abstrak

Fenomena kenaikan tunjangan anggota DPR sering kali memicu diskursus publik yang melibatkan dinamika kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam tuturan anggota DPR terkait isu kenaikan tunjangan dan gelombang demonstrasi tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif melalui bantuan tabulasi persentase untuk melihat kecenderungan dominasi maksim yang muncul. Sumber data diperoleh dari berbagai platform media sosial yang memuat pernyataan resmi maupun opini anggota DPR. Data dikumpulkan melalui teknik simak dan catat terhadap 265 satuan tuturan, yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teoretis maksim kesantunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pematuhan maksim kesantunan masih mendominasi sebesar 61%, sementara pelanggaran maksim (ketidaksantunan) mencapai 39%. Maksim yang paling banyak dipatuhi ialah maksim kesepakatan, sedangkan yang paling banyak dilanggar ialah maksim kerendahan hati. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas tuturan masih menjaga norma komunikasi publik. Tingginya angka pelanggaran mencerminkan adanya resistensi komunikasi dan rendahnya empati pragmatis aktor politik terhadap kondisi sosiokultural masyarakat yang berpotensi memicu eskalasi konflik antara masyarakat dan pemerintah sehingga penerapan teori Leech perlu mempertimbangkan konteks budaya dan situasi komunikasi yang dinamis.

Kata Kunci

Kesantunan Berbahasa, Anggota DPR, Maksim Kesantunan, Konflik Sosial

Abstract

The issue of salary increases for members of the House of Representatives often sparks public discourse involving the dynamics of politeness and impoliteness in language. This study aims to analyze compliance with and violations of the principles of politeness in the speech of House of Representatives members regarding the issue of salary increases and the wave of demonstrations in 2025. This study employs a qualitative descriptive approach using content analysis. Subsequently, the data were analyzed descriptively using percentage tabulations to identify dominant politeness maxim trends. Data sources were obtained from various social media platforms containing both official statements and opinions of DPR members. Data were collected through observation and note-taking of 265 speech units, which were then analyzed using the theoretical framework of politeness maxims. The research results indicate that adherence to the maxims of politeness still dominates at 61%, while violations of the maxims (impoliteness) account for 39%. The maxim most frequently adhered to is the maxim of agreement, whereas the one most frequently violated is the maxim of modesty. The findings indicate that although the majority of utterances still adhere to public communication norms, the high number of violations reflects communication resistance and a lack of pragmatic empathy among political actors toward the sociocultural conditions of society. This has the potential to trigger an escalation of conflict between the public and the government; therefore, the application of Leech's theory must take into account the cultural context and the dynamic nature of the communicative situation.

Keywords

Linguistic Politeness, DPR Members, Politeness Maxims, Social Conflict

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari struktural pejabat publik, anggota DPR memegang peranan krusial dalam mencerminkan kesantunan berbahasa di ruang komunikasi politik tersebut. Hal tersebut karena mereka adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Norvitasari et al., 2023). Sehingga, sebagai wakil rakyat mereka telah berjanji sesuai dengan perundang-undangan akan melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat (Eliana & Junaidi, 2023). Oleh karena itu, segala perilaku dan pernyataan setiap anggota DPR terikat dengan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang diwakilinya. Pernyataan dari setiap anggota DPR haruslah disampaikan dengan tuturan yang santun agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat (Panducita et al., 2024). Tuturan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan moral, kesantunan, dan konteks sosial, sehingga akan membuat anggota DPR bisa menjalankan hak menyatakan pendapatnya tanpa menimbulkan kesalahpahaman serta meminimalisir penolakan atau ketersinggungan masyarakat terhadap kebijakan yang buat.

Kebijakan yang sudah dibuat juga tentunya perlu dijelaskan kembali kepada masyarakat dengan cara yang baik. Di sinilah, kesantunan berbahasa seharusnya ditunjukkan oleh setiap anggota DPR agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Namun, pada kenyataannya anggota DPR tidak selalu menunjukkan kesantunan berbahasa. Salah satu contohnya, ketika isu kebijakan tunjangan anggota DPR hingga memicu terjadinya demonstrasi pada bulan Agustus tahun 2025 yang menghadirkan kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa dari anggota DPR (Mae, 2025). Sejumlah anggota DPR justru bersikap dan memberikan pernyataan yang dianggap menyinggung atau tidak simpati terhadap kondisi rakyat. Media Survei Nasional (Median, 2025) telah merilis hasil survei terkait demonstrasi tersebut pada September 2025. Dari survei tersebut, disimpulkan bahwa ada 2 penyebab utama terjadinya demonstrasi, yakni kebijakan tunjangan DPR serta perilaku anggota DPR yang berupa sikap dan ketidaksantunan ucapan yang dinilai tidak simpati terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bahasa yang digunakan oleh pejabat publik akan sangat berpengaruh terhadap pandangan dan reaksi masyarakat luas (Sobari & Fauziah, 2025). Ketidaksantunan tersebut tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi menurunkan citra dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menjadi wakil rakyat (Putri et al., 2026).

Ketegangan sosial akibat tuturan pejabat publik tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan hakikat bahasa sebagai instrumen fundamental dalam proses interaksi manusia (Sumarno & Wakaimbang, 2022). Melalui bahasa, seseorang menyampaikan maksud yang diinginkan kepada orang lain dengan fokus interaksi tidak hanya berada pada produksi ujaran bermuatan pesan, tetapi juga mencakup metode atau cara penyampaian (Mulyani, 2023). Cara penyampaian tersebut pada akhirnya menentukan penafsiran makna dari wujud konkret bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang mewujudkan sebagai tuturan. Dalam lanskap komunikasi politik modern, tuturan tidak lagi dinilai sebatas realisasi empiris dari susunan gramatikal yang kaku, melainkan dipahami secara strategis sebagai bentuk tindakan nyata (*speech acts*) yang fungsional (Rahmayanti et al., 2025). Tuturan lahir dari kegiatan komunikasi yang terikat oleh konteks tertentu, yaitu latar belakang pengetahuan yang dimengerti bersama oleh penutur dan lawan tutur (Rahardi et al., 2016). Dalam peristiwa tutur, lawan tutur atau interpreter tidak hanya mencakup sasaran utama (*participant: addressee* dan *side-participant*), melainkan juga pihak lain yang turut hadir di sekitar peristiwa tersebut (*non-participant: bystander* dan *overhearer* yang dikerucutkan menjadi *listener-in* dan *eavesdropper*), Varschueren (1998) dalam (Rahardi et al., 2016).

Dalam lingkup ilmiah, analisis mendalam mengenai kompleksitas tuturan dan konteks nonkebahasaan tersebut dikaji melalui pendekatan pragmatik (Leech, 1993). Pragmatik bukan sekadar studi bahasa normatif melainkan sebuah analisis strategis yang menelaah bagaimana penutur dalam hal ini pejabat publik memilih strategi kebahasaan tertentu guna memengaruhi emosi, persepsi, dan tindakan audiens atau masyarakat luas (Rahmayanti et al., 2025). Melalui ilmu pragmatik, sebuah tuturan dapat dibedah secara kontekstual, salah satunya menggunakan prinsip kesantunan berbahasa (Syafuruddin, 2018). Kesantunan berbahasa sendiri berkaitan dengan kemampuan pemilihan kata, kalimat, intonasi, nada, dan gaya bahasa yang tepat agar setiap individu merasa dihargai saat berinteraksi (Pratamanti et al., 2018). Sebagai makhluk sosial yang selalu melakukan komunikasi verbal, kesantunan menjadi upaya vital untuk memperkecil konflik guna menjaga tujuan-tujuan relasional (Mulyani, 2023). Oleh karena itu, kesantunan berbahasa harus diutamakan oleh masyarakat, terlebih bagi para pejabat publik dan elit politik yang memiliki tuntutan lebih besar untuk menerapkan tata krama tersebut dalam praktik komunikasi mereka. Melalui tutur katanya, para pejabat diharapkan mampu menjalankan hak

menyatakan pendapat tanpa menimbulkan kesalahpahaman, serta meminimalisir penolakan atau ketersinggungan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat.

Untuk melihat sejauh mana fenomena kesantunan dan ketidaksantunan anggota DPR dalam isu kenaikan tunjangan dan demonstrasi 2025 dapat dikaji secara mendalam menggunakan teori kesantunan Leech, (2014). (Leech, 2014) memberikan sebuah teori kesantunan berbahasa berdasarkan sepuluh maksim pematuhan kesantunan, yang terdiri dari maksim kearifan (*Tact*), maksim kedermawanan (*Generosity*), maksim pujian (*Approbation*), maksim kerendahan hati (*Modesty*), maksim kesepakatan (*Agreement*), Maksim simpati (*Sympathy*), maksim permintaan maaf (*Obligation S to O*), maksim pemberian maaf (*Obligation O to S*), maksim perasaan (*Feeling Reticence*), dan maksim berpendapat (*Opinion Reticence*). Leech, (2014) juga menambahkan konsep pelanggaran kesantunan yang secara prinsip merupakan kebalikan dari pematuhan maksim kesantunan tersebut. Pelanggaran tersebut bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja yang akhirnya menghasilkan tuturan yang cenderung bersifat merugikan.

Pendapat Leech mengenai sepuluh maksim tersebut memberikan asumsi bahwa prinsip kesantunan menjadi pelengkap prinsip kerja sama Grice (Arma & Katubi, 2022). Selain itu, teori Leech dinilai memiliki pandangan sosial, sehingga banyak dijadikan referensi peneliti dari Timur yang lebih menilai perilaku santun sebagai pedoman norma sosial (Pramujiono et al., 2020). Oleh karena itu, teori Leech, (2014) dianggap relevan untuk mengkaji tuturan anggota DPR Indonesia yang menilai bahwa kesantunan adalah hal yang wajib dalam proses interaksi sosial karena dianggap sebagai cerminan tata krama dan penghormatan terhadap norma sosial. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan dengan teori Leech, (2014) sebagai rujukan dalam mengkaji kesantunan berbahasa pada tuturan anggota DPR terkait isu tunjangan dan demonstrasi 2025.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh adanya celah empiris (*research gap*) dari penelitian-penelitian terdahulu. Kajian kesantunan berbahasa pejabat atau politikus dalam ranah media sosial yang menghadirkan pematuhan dan pelanggaran enam maksim kesantunan Leech (1983) sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan (Marizal, 2025; Mulyono, 2020; Niswasani & Juita, 2019). Di sisi lain, penelitian sosiolinguistik yang menyentuh subjek legislatif, seperti yang dilakukan oleh (Yusuf & Hafriana, 2025), hanya memotret bentuk kesantunan anggota DPR sepanjang tahun 2025 secara makro berdasarkan empat aspek umum (pragmatik, sosiolinguistik, psikologis, dan digital). Penelitian tersebut tidak berfokus pada konteks spesifik seperti isu tunjangan dan demonstrasi, tidak menguji tuturan-tuturan langsung anggota DPR secara tekstual, serta belum membedakan pematuhan dan pelanggaran kesantunan berbahasa secara mendetail. Padahal, pemisahan aspek pematuhan dan pelanggaran tersebut sangat penting untuk mengukur sejauh mana pejabat publik mampu mempertahankan prinsip kesantunan berbahasa dalam situasi krisis. Oleh karena itu, *gap* penelitian yang diisi oleh penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis pematuhan dan pelanggaran sepuluh maksim kesantunan berbahasa Leech, (2014) pada tuturan langsung anggota DPR terkait isu tunjangan dan demonstrasi 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk tanpa melibatkan analisis statistik. Sahir, (2021) menjelaskan bahwa pendekatan ini berfokus pada analisis data berupa kalimat, sementara, Fauzi et al., (2022) menekankan bahwa kekuatan laporan laporan kualitatif terletak pada kedalaman kata dan makna yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengkaji fenomena kebahasaan secara naturalistik.

Sumber data diperoleh dari media sosial yang memuat pernyataan anggota DPR terkait isu tunjangan dan demonstrasi 2025 melalui wawancara, siniar, maupun unggahan pribadi. Kriteria pemilihan sumber data berupa video didasarkan pada pertimbangan bahwa konteks videonya selaras dengan fokus penelitian yang secara spesifik menghadirkan isu kenaikan tunjangan anggota DPR dan demonstrasi tahun 2025. Pengambilan sampel menerapkan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tuturan yang relevan terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2022) di atas. Data dihimpun selama rentang waktu Agustus hingga September 2025. Berdasarkan keseluruhan sumber data, diperoleh 504 tuturan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 265 tuturan dipilih sebagai sampel karena memiliki relevansi dengan fokus dan tujuan penelitian, yakni tuturan langsung anggota DPR terkait isu kenaikan tunjangan anggota DPR dan demonstrasi tahun 2025. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan referensi sebagai

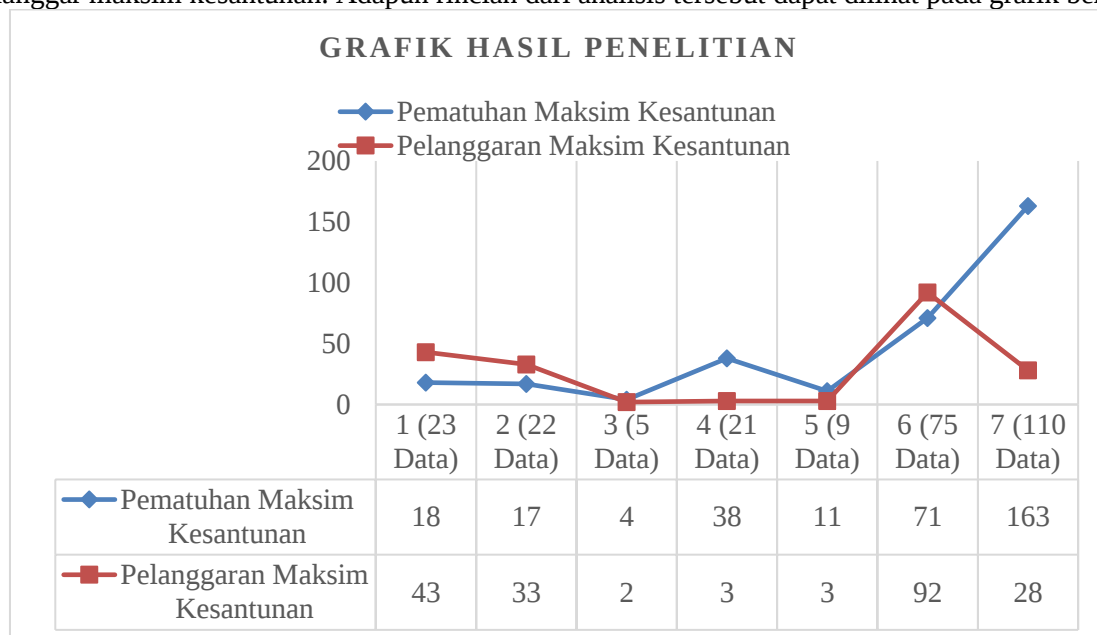
pendukung untuk memastikan validitas data yang telah ditemukan (Sugiyono, 2022). Bahan referensi tersebut berupa laporan hasil transkripsi video tuturan yang disesuaikan dengan video asli.

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik simak dan catat untuk mentranskripsi tuturan lisan menjadi bahasa tulis (Mahsun, 2017). Proses ini dilakukan dengan menyimak video secara saksama, kemudian mencatat setiap tuturan ke dalam bentuk teks atau bahasa tulis. Setelah data hasil transkripsi terkumpul, data tersebut diolah dengan teknik analisis isi untuk menafsirkan makna pesan melalui teks (Haryoko et al., 2020). Menurut (Nartin et al., 2024) proses ini melibatkan pengkodean dan kategorisasi data berdasarkan teori kesantunan berbahasa Leech. Penelitian ini menerapkan pengkodean khusus, yakni menggunakan simbol P1-P10 untuk mengidentifikasi pemuatan sepuluh maksim kesantunan dan simbol PL1-PL10 untuk mengidentifikasi pelanggaran sepuluh maksim kesantunan. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2022). Pada tahap reduksi data, peneliti memilah data dari 504 tuturan menjadi 265 tuturan yang menjadi sampel penelitian karena tuturan tersebut diproduksi oleh anggota DPR. Selain itu, pada tahap reduksi juga dilakukan proses pengkodean menggunakan simbol P1-P10 untuk pemuatan sepuluh maksim kesantunan dan simbol PL1-PL10 untuk pelanggaran sepuluh maksim kesantunan. Tahap kedua, data disajikan dalam bentuk tabel analisis yang memuat kolom tuturan, konteks tuturan, kategori pemuatan dan pelanggaran maksim kesantunan, serta kolom analisis. Tahap akhir, yakni penarikan simpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti membuat simpulan yang diverifikasi kembali dengan teori kesantunan Leech, (2014). Tahap-tahap tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi antara hasil analisis dengan konteks asli tuturan guna menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Serangkaian proses identifikasi dan analisis menggunakan 10 maksim kesantunan berbahasa Leech, (2014) terhadap 13 video dari 7 anggota DPR telah mengumpulkan total 265 data tuturan. Secara keseluruhan, dari total data yang telah dikumpulkan memperlihatkan bahwa jumlah tuturan yang mematuhi maksim kesantunan memiliki frakuensi lebih tinggi dibandingkan dengan tuturan yang melanggar maksim kesantunan. Adapun rincian dari analisis tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Hasil Analisis Maksim Kesantunan Berbahasa

Berdasarkan grafik hasil analisis, tuturan anggota maksim kesantunan berbahasa. Meski demikian, sekecil apapun pelanggaran kesantunan berbahasa jika dituturkan oleh anggota DPR akan berdampak pada dinamika sosial dan dampak tersebut sudah dirasakan pada saat isu kenaikan tunjangan DPR hingga terjadinya aksi demonstrasi karena adanya pelanggaran kesantunan berbahasa oleh anggota DPR. Berikut adalah penjelasan tentang hasil penelitiannya.

Pematuhan Kesantunan Berbahasa

Maksim Kearifan (*Tact*)

Pematuhan maksim kearifan (*Tact*) terjadi jika penutur memperkecil kerugian dan memperbesar keuntungan untuk lawan tutur (Leech, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 69 data pematuhan maksim kearifan, tetapi lebih dominan ditemukan pada tuturan anggota DPR 4. Berikut temuan pematuhan maksim kearifan pada tuturan anggota DPR 4 yang menyatakan:

“Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara.” (1:21-1:41) (Data 51)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 4 merespons pertanyaan wartawan terkait demonstrasi yang sedang terjadi. Ia menggunakan pendekatan persuasif untuk menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga yang terbuka terhadap kritik. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kearifan karena anggota DPR 4 memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa wadah untuk menampung aspirasi. Dengan mengatakan *“tetap menampung semua aspirasi masyarakat”* dan *“kami minta masukan dari masyarakat”*, menunjukkan bahwa ia memberikan keuntungan bagi masyarakat karena aspirasi mereka akan ditampung dan masyarakat ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan untuk memberikan masukan kepada kinerja DPR. Sebagai temuan lainnya, pematuhan maksim kearifan juga ditemukan pada tuturan anggota DPR 1 yang menyatakan:

“Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima.” (0:12-0:17) (Data 1)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 menyadari bahwa telah terjadi ketidakpuasan yang masif di masyarakat terhadap kinerja DPR. Ia memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat yang terbuka terhadap kritik. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kearifan karena anggota DPR 1 memberikan keuntungan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa batasan. Masyarakat boleh mengkritik bahkan mencaci maki DPR yang menunjukkan bahwa anggota DPR 1 sedang membuka wadah komunikasi yang luas agar masyarakat merasa memiliki hak penuh untuk beraspirasi bahkan menyalurkan emosinya.

Maksim Kedermawanan (*Generosity*)

Pematuhan maksim kedermawanan (*Generosity*) terjadi jika penutur memperbesar pengorbanan diri sendiri dan memperkecil keuntungan diri sendiri (Leech, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 11 data pematuhan maksim kedermawanan pada tuturan 7 anggota DPR. Berikut temuan pematuhan maksim kedermawanan pada tuturan anggota DPR 6 yang menyatakan:

“Ngapain kita minta-minta karena aktivisme ini kan bagian dari hobi aja.” (44:12-44:15) (Data 145)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 menghadapi tekanan dari pembawa acara yang menyimpulkan bahwa ia *“takut dianggap minta-minta”* soal gajinya. Untuk membalikkan keadaan, ia membangun kesan bahwa dirinya menjadi DPR dilandasi rasa senang atau hobi. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kedermawanan karena anggota DPR 6 memperbesar pengorbanan dan memperkecil keuntungan bagi dirinya dengan memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat yang rela menanggung beban pekerjaan besar tanpa membutuhkan gaji atau uang tambahan. Temuan lainnya, pematuhan maksim kedermawanan juga ditemukan pada tuturan anggota DPR 7 yang menyatakan:

Pembawa Acara:	<i>“Iya, itu saya tahu tuh, akhirnya di kasih duit kan?” (3:41-3:44)</i>
Anggota DPR 6:	<i>“Sebenarnya kayak contoh, DPR DKI juga dapet tunjangan rumah loh 78 juta per bulan, dan beberapa tingkat dua juga provinsi emang ada tunjangan-tunjangan seperti itu. Nah kalau di tanya lagi secara pribadi, silahkan tunjangan di hapus semua, gaji mau dapat silahkan....” (3:43-4:25) (Data 162)</i>

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 7 membangun narasi bahwa tunjangan rumah bukan cuma ada di DPR RI. Ia memberi contoh DPRD DKI Jakarta yang tunjangannya bahkan sampai 78 juta. Hal ini bertujuan agar masyarakat sadar bahwa ini adalah sistem yang diatur undang-undang, bukan keinginan sepihak anggota DPR. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kedermawanan karena anggota DPR 7 memperbesar pengorbanan dan memperkecil keuntungan bagi dirinya dengan mengatakan “*Nah kalau di tanya lagi secara pribadi, silahkan tunjangan di hapus semua*”. Ia memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat yang rela menanggung beban pekerjaan besar tanpa membutuhkan tunjangan yang besar.

Maksim Pujian (Generosity)

Pematuhan maksim pujian terjadi jika penutur memperbesar pujian atau penghargaan untuk lawan tutur dan memperkecil cemoohan untuk lawan tutur (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, pematuhan maksim pujian hanya ditemukan 2 data dan hanya terdapat pada tuturan anggota DPR 6. Berikut temuan pematuhan maksim pujian pada tuturan anggota 6:

- Pembawa Acara: “*Kalau ketemu konstituen itu harus ada amplop ya? Mungkin amplop terlalu terlalu keras, tapi uang, enggak boleh tangan kosonglah.*” (50:19-50:33)
- Anggota DPR 6: “*Sebenarnya bukan amplop uang bensin lah. Uang bensin lah. Yang mereka harus kita berikan. Yang kedua bisa jadi juga itu bisa mengganti waktunya gitu ya. Seperti seorang profesional lah kita minta pendapatnya apa macam-macam. Tentu kan kita harus punya apresiasi atas segala waktu dan kesempatan yang diberikan pertemuan bersama kami gitu. Dan saya kira itu apa namanya? penghargaan yang layaklah buat yang menghadiri.*” (50:19-51:06) (Data 154)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 membangun narasi bahwa masyarakat yang ia temui adalah pihak yang terhormat dan berharga waktunya sehingga pemberian uang bensin bukan dianggap sebagai suap, melainkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan yang layak. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim pujian karena anggota DPR 6 memberikan penghargaan kepada masyarakat melalui pernyataan “*saya kira itu apa namanya? penghargaan yang layaklah...*”. Ia memberikan penghargaan bagi masyarakat yang meluangkan waktunya untuk datang ke tempat kegiatan konstituen.

- Ketua BEM UNPAD 2022: “*Kalau ini memang jadi perjuangan Kaukus Muda di dalam kemudian baru daskomatan itu, ya heroik dong teman-teman muda di sana...*” (52:41-52:53)
- Anggota DPR 6: “*Ya, saya sih mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik saya, Ketua BEM UNPAD sebelumnya nih. Saya juga pernah ketua BEM, saya paham.*” (52:54-53:05) (Data 155)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 berupaya mencairkan ketegangan antara pejabat publik dan aktivis mahasiswa dengan cara membangun ikatan emosional sebagai sesama mantan aktivis. Ia memberikan penghargaan kepada ketua BEM UNPAD. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim pujian karena anggota DPR 6 memberikan apresiasi atau penghargaan kepada ketua BEM UNPAD melalui pernyataan “*Ya, saya sih mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik saya, Ketua BEM UNPAD...*”.

Maksim Kerendahan Hati (Modesty)

Pemantuhan maksim kerendahan hati terjadi jika penutur dan lawan tutur saling merendahkan diri sendiri dan memperkecil pujian untuk diri sendiri (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 23 data pematuhan maksim kerendahan hati. Misalnya, temuan pematuhan maksim kerendahan hati pada tuturan anggota DPR 6:

- Pembawa Acara: “*Atau mungkin karena Anda masih baru kali?*” (39:18-39:20)
- Anggota DPR 6: “*Nggak ada ya. Saya ingin menyampaikan ini. Kita nih mungkin bukan orang baik, tapi enggak sejahat yang orang pikirkan.*” (39:21-39:28) (Data 138)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 berupaya menghilangkan persepsi masyarakat bahwa anggota DPR itu jahat. Ia ingin agar masyarakat melihat anggota DPR sebagai manusia biasa yang punya salah, tetapi juga tidak sejahat apa yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kerendahan hati karena anggota DPR 6 mengakui kekurangan dirinya dan lembaganya melalui pernyataan *“Kita nih mungkin bukan orang baik...”*. Sebagai temuan lainnya, pematuhan maksim kerendahan hati juga ditemukan pada tuturan anggota DPR 1 yang menyatakan:

“Yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak! Tapi, minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya.” (1:25-1:38) (Data 10)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 mencoba menarik simpati masyarakat, tetapi ia tetap menyelipkan pembelaan bahwa anggota DPR sudah berkeja dengan mumpuni. Ia terlihat tidak konsisten. Awalnya ia bersikap rendah hati dengan mengatakan kalau dirinya masih perlu dievaluasi dan belum tentu benar, tetapi di akhir ia justru memuji kerjaannya sudah mumpuni. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kerendahan hati karena di kalimat awal anggota DPR 1 mengakui kekurangannya *“Yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak!”*. Ia berupaya menunjukkan bahwa anggota DPR juga manusia yang bisa salah dan kinerjanya layak untuk dievaluasi. Namun, tuturan tersebut melanggar maksim kerendahan hati karena di akhir kalimat ia mengatakan *“Tapi, minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni...”*, yang menunjukkan bahwa ia memuji kinerja DPR sebagai lembaga yang mumpuni bagi masyarakat.

Maksim Kesepakatan (Agreement)

Pematuhan maksim kesepakatan terjadi jika peserta pertuturan, yakni penutur dan lawan tutur saling memperbesar kesepakatan dan memperkecil ketidaksepakatan (Leech, 2014). Namun, apabila seseorang tidak sepenuhnya sepakat dengan pendapat orang lain, biasanya ia tidak akan menyampaikannya secara langsung, melainkan dengan menyampaikan ungkapan penyesalan atau memberikan kesepakatan sebagian (parsial) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 108 data pematuhan maksim kesepakatan, tetapi lebih dominan ditemukan pada tuturan anggota DPR 6 dan 7. Berikut temuan pematuham maksim kesepakatan pada tuturan anggota DPR 6:

Pembawa Acara: “50 juta per bulan?” (9:34-9:35)
 Anggota DPR 6: “Ya, sekitar itu. Nah, terus kemudian yang diributkan juga itu apa? Tunjangan beras gitu. Berapa tuh? 12 juta. Tapi saya ingin menyampaikan jangan dimaknai bahwa 12 juta itu untuk beli beli beras sebulan. Jadi enggak seperti itu. Misalnya kalau kita ketemu dengan jejaring politik partai pada saat kami menyerap aspirasi kan kami...” (9:36-9:58) (Data 94)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 merasa terpojok oleh angka yang disebutkan pembawa acara. Ia mencoba mengubah persepsi masyarakat dari “gaji besar” menjadi “beban kerja berat” dengan menjelaskan bahwa uang tersebut habis digunakan untuk membiayai kegiatan menyerap aspirasi dan jaringan partai. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kesepakatan karena di awal kalimat anggota DPR 6 menyepakati pertanyaan pembawa acara melalui pernyataan *“Ya, sekitar itu...”*. Penggunaan kata “ya” menunjukkan bahwa anggota DPR 6 sepakat dengan pembawa acara. Sebagai temuan lain, pematuhan maksim kesepakatan ditemukan juga pada tuturan anggota 7 yang menyatakan:

Pembawa Acara: “Oke, berarti itu ada masa waktu? Gak bisa langsung hari ini di berhentikan, hari itu juga dia langsung tidak bekerja, proses administrasi sudah selesai, gak bisa kan? gitu maksudnya?” (2:14-2:22)
 Anggota DPR 7: “Iya, termasuk pembubaran DPR. Pertanyaanya, bisa gak DPR dibubarkan? Bisa! Terus bagaimana supaya pembubaran itu konstitusional? Amandemen lagi Undang-Undang Dasarnya, di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar pasal 17C itu dikatakan bahwa DPR tidak bisa dibekukan bahkan di bubarkan. Jadi, semua balik lagi ke...” (2:22-2:44) (Data 159)

Konteks tuturan di atas, pembawa acara bertanya proses pemberhentian anggota DPR yang terkesan ribet dan lama, anggota DPR 7 menjawabnya dengan narasi bahwa aturan di DPR itu tertulis di konstitusi negara dan ada pasal yang menyebutkan bahwa DPR tidak bisa dibubarkan sembarangan. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim kesepakatan karena anggota DPR 7 di awal kalimat anggota DPR 7 menyepakati apa yang dikatakan pembawa acara melalui penggunaan kata “iya...”

Maksim Simpati (Sympathy)

Pematuhan maksim simpati terjadi jika peserta pertuturan, yakni penutur dan lawan tutur saling memperbesar rasa simpati dan memperkecil rasa antipati (Leech, 2014). Tujuan dari maksim ini adalah untuk memperlihatkan kepedulian terhadap lawan tutur. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 23 data pematuhan maksim simpati. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 4 yang menyatakan:

“Baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari almarhum saudara Afan Kurniawan dan insyaallah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan, dan ketabahan dalam menerima musibah ini dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah subhanahu wa taala. Amin.” (0:00-0:45) (Data 57)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 4 datang takziah ke rumah Affan Kurniawan, seorang supir ojol yang tewas tertabrak kendaraan taktis brimob saat terjadi bentrokan demonstrasi. Tuturan di atas dikategorikan sebagai pematuhan maksim simpati karena anggota DPR 4 menunjukkan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum dan menyampaikan doa-doa untuk almarhum Affan Kurniawan. Ia memperbesar rasa simpati dengan cara memberikan dukungan moral berupa doa agar keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan, dan ketabahan. Sebagai temuan lainnya, pematuhan maksim simpati ditemukan juga pada tuturan anggota DPR 7 yang menyatakan:

Pembawa Acara:	<i>“No, belum delapan saya baca ini. Dalam 1 tahun ini yang 17 ini tanggal 5 September hari ini tayang ini, udah harus di penuhi!” (38:40-38:48)</i>
Anggota DPR 7:	<i>“Tadi sudah cukup, menurut saya sudah cukup dijelaskan termasuk apa tugas tanggung jawab dari pimpinan DPR, ketua dan wakil, dan sebenarnya mereka hanya sebagai Jubir dari DPR dan keputusan itu tetap di komisi masing-masing, begitu dan kapan tanggung jawab kami sebagai anggota terutama di komisi kita masing-masing? Nah, saya juga sekali lagi turut berduka cita untuk semua. Saya benar-benar sakit karena kebetulan ya, itu saya sebagai ketua umum Konfederasi Rakyat Pekerja. Mereka yang bekerja ojek online termasuk yang ada staff di Makassar karena jaringan saya juga.” (38:49-39:29) (Data 251)</i>

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 7 merespons pembawa acara dengan menjelaskan secara logis bahwa Pimpinan DPR (Ketua/Wakil) sebenarnya hanyalah Juru Bicara (Jubir), sedangkan keputusan krusial ada di tangan komisi-komisi. Setelah itu, suasananya berubah haru saat ia mengungkapkan rasa sakit dan duka citanya atas korban (staf di Makassar dan ojek *online*) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim simpati karena anggota DPR 7 menunjukkan rasa sakit dan duka cita yang mendalam kepada korban demonstrasi ojek online dan staff di Makassar. Dengan demikian, pada tuturan tersebut ia memperbesar rasa simpati.

Maksim Permintaan Maaf (Obligation S to O)

Pematuhan maksim permintaan maaf terjadi jika penutur mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada lawan tutur (Leech, 2014). Maksim ini disampaikan dengan tipikal tuturan *apologizing* dan *thanking* (Leech, 2014). Inti dari maksim ini adalah bagaimana penutur memperkecil pembelaan diri dan mengakui kesalahannya, terutama jika membuat kerugian bagi lawan tutur atau orang lain. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 12 data pematuhan maksim permintaan maaf. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

“Terus kemudian, saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin. Ada beberapa hal yang saya salah memberikan data.” (0:00-0:11) (Data 39)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 2 mengklarifikasi mengenai kenaikan tunjangan yang sebelumnya ia katakan. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim permintaan maaf karena anggota DPR 2 mengakui kesalahannya. Ia sadar bahwa informasi yang sebelumnya ia diberikan keliru. Dengan mengoreksi bahwa sebetulnya tidak ada kenaikan tunjangan, ia berupaya untuk jujur guna memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.

Temuan pematuhan maksim permintaan maaf lainnya ditemukan juga pada tuturan anggota DPR 4 yang menyatakan:

Wartawan: “Mbak, langkah DPR ke depan seperti apa, Mbak? Melihat kemarin kan publik cukup bergejolak di ulang tahun DPR sendiri. Upaya penanganan publik ini seperti apa, Mbak?” (3:06-3:14)

Anggota DPR 4: “Pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama. Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, dari tokoh-tokoh dalam membangun bangsa ini.” (3:15-4:02) (Data 61)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 4 meminta maaf dan menggunakan momen ini untuk berjanji akan berbenah diri dan mendengar aspirasi. Dengan mengajak tokoh-tokoh bangsa untuk berdiskusi, ia ingin menunjukkan bahwa DPR tidak antikritik. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim permintaan maaf karena anggota DPR 4 secara terbuka meminta maaf dan mengakui kekurangan dirinya dan lembaganya di hadapan masyarakat. Ia berjanji akan mengevaluasi dan berbenah diri agar menjadi wakil rakyat yang lebih baik lagi sebagaimana mestinya.

Maksim Perasaan (Feeling Reticence)

Pematuhan maksim perasaan terjadi jika penutur untuk tidak memaksakan perasaan dan bersimpati kepada lawan tutur (Leech, 2014). Dalam praktiknya, maksim ini disampaikan dengan tipikal tuturan *suppressing feelings* (Leech, 2014). Maksim ini berhubungan dalam mengeksresikan perasaan negatif atau ketidakpuasaan (Rahmayanti, 2025). Inti dari maksim ini adalah penutur memaksimalkan emosi positif dan menyembunyikan atau menahan emosi negatifnya demi menjaga kenyamanan lawan tutur. Berdasarkan hasil analisis, hanya ditemukan 4 data pematuhan maksim perasaan. Misalnya, temuan pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

Wartawan: “Pak, kemarin juga disampaikan tunjangan bensin, apakah juga tidak mengalami kenaikan, Pak?” (1:06-1:08)

Anggota DPR 2: “Tidak, tidak juga!” (1:09-1:10) (Data 43)

Konteks tuturan di atas, memberikan jawaban singkat yang objektif dan tidak lagi memaksakan pendapatnya soal kenaikan tunjangan. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim perasaan karena anggota DPR 2 berhasil menahan emosi negatifnya (marah atau tersinggung). Meskipun pertanyaan wartawan bernada sarkas dengan cara mengulang pernyataannya sebelumnya, anggota DPR 2 tetap memberikan jawaban yang tenang sehingga interaksi tetap berjalan baik.

Sebagai temuan lainnya, pematuhan maksim perasaan ditemukan juga pada tuturan anggota DPR 4 yang menyatakan:

Wartawan: “Satu lagi, Mbak Puan. Ini kan bertepatan dengan demo nih, Mbak. Mbak Puan, di DPR sendiri seperti apa ngeliatnya, Mbak Puan?” (1:14-1:20)

Anggota DPR 4: “Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara.” (1:21-1:41) (Data 51)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 4 merespons pertanyaan wartawan terkait demonstrasi yang sedang terjadi. Ia menggunakan pendekatan persuasif untuk menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga yang terbuka terhadap kritik. Hal itu dilakukan untuk meredam kemarahan masyarakat.

Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim perasaan karena anggota DPR 4 tidak menunjukkan emosi negatif di tengah situasi penuh tekanan (demo). Ia bersikap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik, ia tetap menjaga kewibawaannya untuk menjaga suasana wawancara tetap kondusif. Dengan berjanji akan tetap menampung aspirasi dan mengajak masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja DPR, ia sedang membangun emosi positif. Ia berupaya agar masyarakat merasa dihargai sehingga bisa mengurangi ketegangan yang sedang terjadi.

Maksim Berpendapat (*Opinion Reticence*)

Pematuhan maksim terjadi jika penutur menyampaikan pendapatnya dengan santun tanpa terkesan memaksakan pendapatnya (Leech, 2014). Inti dari maksim ini adalah mengatur bagaimana cara penutur menyampaikan pendapatnya dan tidak terkesan sok tahu atau memaksakan pendapatnya agar tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Dalam mematuhi maksim ini, seseorang penutur biasanya akan melunakkan kekuatan pendapatnya menggunakan kalimat penghalus yang ditandai dengan “*saya pikir*”, “*mungkin*”, “*saya tidak yakin*”, atau “*mungkin saja*” (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 70 data pematuhan maksim berpendapat, tetapi lebih dominan ditemukan pada tuturan anggota DPR 3 dan 5. Misalnya, teman pada tuturan anggota DPR 3 yang menyatakan:

“Enggak bener, sama sekali, enggak bener. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan. Ya kan. rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi, sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak.” (0:06-0:29) (Data 46)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 3 merespons pertanyaan masyarakat terkait isu kenaikan tunjangan komunikatif dalam interaksi media sosial. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim berpendapat karena anggota DPR 3 memberikan klarifikasi secara objektif guna meluruskan informasi yang simpang siur sehingga bisa menghindari perdebatan yang tidak perlu. Penggunaan kata “*kompensasi*” bertujuan mengubah klaim masyarakat yang sebelumnya mengira tunjangan itu sebagai kenaikan tunjangan, padahal pengganti dari tidak adanya rumah dinas. Ini cara ia melunakkan pendapatnya agar mudah diterima oleh masyarakat dan masyarakat dapat memahami konteks kebijakan tersebut.

Sebagai temuan lainnya, pematuhan maksim berpendapat ditemukan juga pada tuturan anggota DPR 5 yang menyatakan:

- Wartawan: *“Tapi kalau angka 50 jutanya itu didapatkan dari mana sih, Bang? Ada yang bilang kan dari Menklu, ada yang bilang kan dari Sekjen, atau seperti apa?” (3:07-3:15)*
- Anggota DPR 5: *“Saya kurang jelas itu kemudian diputuskannya itu, biasanya diputuskannya di Menkeu tapi kemudian usulannya kemungkinan dari Sekretariat Jenderal dengan hitung-hitungan sewa harga, harga sewa rumah di Jakarta untuk selama 5 tahun, ya selama 5 tahun. Oke. Jadi jelas ya bahwa itu adalah untuk sewa selama 5 tahun.” (3:16-3:45) (Data 77)*

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 5 menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu detail teknis soal nominal uang tersebut demi menjaga validitas informasi yang ia sampaikan. Ia menegaskan sekali lagi bahwa nominal uang tersebut didasarkan pada harga sewa rumah di Jakarta yang akan digunakan untuk kebutuhan 5 tahun sekaligus. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pematuhan maksim berpendapat karena anggota DPR 5 tidak terkesan sok tahu. Ia mengakui keterbatasan pengetahuannya dengan menggunakan kalimat pelunak “*saya kurang jelas*” yang menunjukkan bahwa ia menahan diri untuk memberikan informasi yang belum terverifikasi secara pasti olehnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko memberikan informasi yang salah. Selain itu, penggunaan kata “*kemungkinan*” menunjukkan bahwa ia tidak memaksakan pendapatnya sebagai kebenaran mutlak. Ia sadar bahwa dirinya memiliki keterbatasan pengetahuan tentang hal tersebut, maka ia tidak memberikan jawaban yang pasti dan lebih memilih melunakkan pendapatnya.

Pelanggaran Kesantunan Berbahasa

Maksim Kearifan (*Tact*)

Pelanggaran maksim kearifan terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pematuhan, yakni memperbesar kerugian lawan tutur dan memperkecil keuntungan lawan tutur (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini biasanya disampaikan dengan tipikal tuturan memerintah (*ordering*) dan menuntut (*demanding*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 29 data pelanggaran maksim kearifan. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 1 yang menyatakan:

“Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, ini dihujat, enggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga enggak apa-apa. Masih Berdiri DPR-nya, sampai kapan pun, tidak akan berubah, sama aja. Terima kasih ya.” (1:39-1:53) (Data 11)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 merasa bahwa segala bentuk hujatan dan cacian masyarakat sama sekali tidak berpengaruh kepada DPR. Ia menegaskan DPR tetap akan berdiri dan tidak akan goyah hanya karena komentar negatif atau hujatan masyarakat. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kearifan karena anggota DPR 1 memperbesar kerugian dan memperkecil keuntungan masyarakat melalui kalimat *“Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat...”*. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa ia memberikan batasan terhadap aspirasi masyarakat. Ia sedang mencoba mengatur bagaimana seharusnya masyarakat bersikap.

Sebagai temuan lainnya, pelanggaran maksim kearifan juga terdapat pada tuturan anggota DPR 6 yang menyatakan:

Pembawa Acara: *“Kenapa enggak? Yang enggak berani itu apanya?”* (3:23-3:25)
 Anggota DPR 6: *“Terkait dengan jumlahnya. Karena setiap orang pasti akan menilai dengan berbeda-beda terkait dengan apa yang kami diberikan oleh negara kepada kami. Sesuatu yang menurut kami harus kami syukuri. Sudah kami syukuri.”* (3:26-4:40) (Data 83)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 sadar jika ia menyebutkan angka pastinya, masyarakat akan semakin ribut dan menghujat. Ia ingin masyarakat merasa bahwa soal gaji itu masalah sudut pandang saja, bukan masalah besar atau kecil. Jadi, ia berupaya mencari jalan tengah yang netral supaya tidak perlu mengaku kalau gajinya memang besar, tapi juga tidak perlu berbohong kepada masyarakat. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kearifan karena anggota DPR 6 lebih mementingkan keuntungan dirinya agar tidak dihujat karena gajinya besar daripada memberikan keuntungan bagi masyarakat yang membutuhkan transparansi.

Maksim Kedermawanan (*Generosity*)

Pelanggaran maksim kedermawanan terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pematuhan, yakni penutur memperkecil pengorbanan diri sendiri dan memperbesar keuntungan diri sendiri (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini biasanya disampaikan dengan tipikal tuturan menolak (*refusing*) dan mengancam (*threatening*) yang ditunjukkan untuk mendatangkan kerugian bukan keuntungan kepada orang lain (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 23 data pelanggaran maksim kedermawanan. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

“Kalau dikalikan 1 bulan, dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok. Kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu.” (0:33-1:09) (Data 27)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 2 berupaya memberikan pembenaran atas tunjangan 50 juta yang diberikan. Ia membangun narasi biaya hidup tinggi di Senayan dengan membandingkan estimasi biaya sewa selama 26 hari kerja yang totalnya mencapai 78 juta. Dengan itu, ia ingin menciptakan kesan bahwa tunjangan tersebut bukanlah kemewahan, melainkan masih kurang jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah di Senayan. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kedermawanan karena anggota DPR 2 terlihat enggan untuk berkorban melalui penggunaan kata *“nombok”*. Dengan mengatakan bahwa masih ada biaya yang harus ditanggung

sendiri, ia gagal menunjukkan sikap dermawan karena terlihat pertihitungan dan tidak mau berkorban. Ia lebih fokus pada kerugiannya daripada menunjukkan komitmen untuk melayani masyarakat tanpa syarat.

Sebagai temuan lainnya, pelanggaran maksim kedermawanan juga ditemukan pada tuturan anggota DPR 1 yang menyatakan:

“Misalnya, kayak gua contoh, gitu di dapil itu. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan yang enggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang enggak suka, misalnya gitu.” (2:37-2:56) (Data 20)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 ingin mematahkan tuduhan nirempati dengan upaya memvalidasi bahwa ia memberikan bantuan secara rutin tanpa harus dipublikasikan. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kedermawanan karena anggota 1 mengungkit-ungkit bantuan yang ia berikan kepada masyarakat di dapilnya. Logikanya, orang yang benar-benar dermawan tidak akan mengungkit-ungkit bantuannya kepada orang lain. Dengan mengungkit bantuan itu, ia sebenarnya sedang ingin mendapatkan keuntungan berupa citra positif. Ia menonjolkan pengorbanan pribadinya (memberi bantuan tiap hari/minggu) agar masyarakat memaklumi tunjangan besar yang ia terima.

Maksim Pujian (Approbation)

Pelanggaran maksim pujian terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pematuhan, yakni penutur memperkecil pujian untuk lawan tutur dan memperbesar cemoohan untuk lawan tutur (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini biasanya disampaikan dengan tipikal tuturan yang menghina (*insulting*), mengeluh (*complaining*), dan menegur atau memarahi (*telling off*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 14 data pelanggaran maksim pujian. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 1 yang menyatakan:

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat tuh!” (1:04-1:10) (Data 8)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 merespon dengan tegas orang-orang yang memberikan narasi “bubarkan DPR”. Menurutnya, hal tersebut adalah pikiran yang tidak logis dan tidak paham sistem tata negara, oleh karenanya ia menggunakan kata “tolol” sebagai bentuk pelabelan terhadap pola pikir masyarakat yang dianggapnya keliru. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim pujian karena anggota DPR 1 memberikan penghinaan kepada masyarakat yang mengkritik melalui kalimat “*mental orang tertolol sedunia*”. Pernyataan ini sangat tidak santun, pada akhirnya memicu kemarahan masyarakat yang luar biasa karena dianggap arogan dan tidak pantas. Akibat dari tekanan masyarakat, anggota DPR 1 akhirnya dinonaktifkan dari anggota DPR karena pernyataannya tersebut.

Sebagai temuan lainnya, pelanggaran maksim pujian juga ditemukan pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

“Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu ya. Kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya Rp 3 juta, Pak.” (5:17-5:39) (Data 38)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 2 menggunakan gaya bahasa yang mengejek untuk merespons kritik masyarakat. Dengan menyebut kos-kosan 1 juta dan kamar mandi luar, ia memposisikan standar hidup rakyat kecil sebagai sesuatu yang tidak layak bagi DPR, sehingga ia menjadikannya bahan sindiran untuk membela tunjangan mewahnya. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim pujian karena anggota DPR 2 menghina atau mengejek standar hidup rakyat kecil. Ia memposisikan kos-kosan yang murah sebagai sesuatu yang mengesankan atau tidak layak bagi DPR. Padahal itu adalah realitas hidup banyak masyarakat yang ia wakili. Ia menjadikan standar hidup masyarakat kelas bawah sebagai cemoohan.

Maksim Kerendahan Hati (Modesty)

Pelanggaran maksim kerendahan hati terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pemuatan, yakni penutur dan lawan tutur tidak merendahkan diri sendiri dan memperbesar pujian untuk diri sendiri (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini biasanya disampaikan dengan tipikal tuturan yang membanggakan diri (*boasting*) dan merasa puas diri (*being complacent*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 59 data pelanggaran maksim kerendahan hati, tetapi lebih dominan ditemukan pada tuturan anggota DPR 1 dan 2. Berikut temuan pada tuturan anggota DPR 1 yang melanggar maksim ini:

“Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah, jadi, duduk di DPR.” (0:31-0:37) (Data 5)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 meragukan kredibilitas pengkritiknya dengan mengatakan bahwa pengkritik tidak punya pengalaman menjadi anggota DPR. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kerendahan hati karena anggota DPR 1 menunjukkan kesombongan atas status jabatannya. Melalui pernyataan bahwa masyarakat yang mengkritik adalah orang-orang yang tidak pernah duduk di DPR, ia justru menonjolkan dirinya sebagai pihak yang paling paham karena memiliki pengalaman langsung di lembaga tersebut. Bukannya bersikap rendah hati dengan mendengarkan keluhan masyarakat, ia justru memamerkan kelebihannya untuk membangun jarak antara dirinya dengan masyarakat. Berikut temuan pelanggaran maksim kerendahan hati pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

“Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu.” (3:39-4:02) (Data 34)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 2 mengaitkan kenaikan harga beras dan telur untuk membenarkan kenaikan tunjangan. Ia mengakhiri penjelasannya dengan ekspresi syukur dan terima kasih atas kenaikan tunjangan tersebut. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kerendahan hati karena anggota DPR 2 mengatakan *“Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan...”*, ia memosisikan dirinya dan lembaganya sebagai pihak yang layak mendapatkan belas kasihan dari Menteri Keuangan. Ia merasa angkuh karena mendapatkan perlakuan istimewa dari Menteri Keuangan. Jika ia rendah hati, seharusnya ia malu atau segan membicarakan kenaikan tunjangan di hadapan masyarakat yang sedang kesulitan.

Maksim Kesepakatan (Agreement)

Pelanggaran maksim kesepakatan terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pemuatan, yakni peserta pertuturan saling memperkecil kesepakatan dan memperbesar ketidaksepakatan (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini disampaikan dengan tipikal tuturan tidak setuju (*disagreeing*) dan menyanggah atau menolak (*contradicting*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 40 data pelanggaran maksim kesepakatan. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 6 yang menyatakan:

Pembawa Acara: *“Jumlah gajinya kan sudah, sudah disebutkan itu bisa lebih dari 230 juta per bulan.” (4:57-5:04)*

Anggota DPR 6: *“Enggak, enggak, enggak, enggak sampai segitu. Enggak 230 juta enggak sampai segitu.” (5:05-5:08) (Data 85)*

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 langsung membantah pernyataan pembawa acara karena ia tahu kalau diam saja atau menjawab terlalu tenang, orang-orang akan menganggap angka itu benar. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kesepakatan karena anggota DPR 6 secara tegas menolak untuk sepakat dengan pembawa acara. Dengan mengulang kata *“Enggak”* sampai empat kali, ia menunjukkan ketidaksetujuan total terhadap angka 230 juta tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas.

Sebagai temuan lainnya, pelanggaran maksim kesepakatan juga terdapat pada tuturan anggota DPR 1 yang menyatakan:

“Nah, tapi untuk spesifik yang gua sampein bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek. yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’ Enggak ada itu bahasa gue.” (0:34-0:48) (Data 12)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 menyadari bahwa kata “tolol” yang ia ucapkan menimbulkan kemarahan besar masyarakat. Pada tuturan tersebut, ia meluruskan bahwa ada kesalahpahaman antara apa yang ia ucapkan dengan apa yang ditafsirkan oleh masyarakat. Tuturan tersebut melanggar maksim kesepakatan karena ia tidak setuju dengan pendapat masyarakat yang menganggap bahwa ia menghina. Dengan mengatakan “*Enggak ada itu bahasa gue*”, ia secara tegas memutus kesepakatan pendapat antara dirinya dengan masyarakat yang sedang marah karena ucapannya.

Maksim Simpati (Sympathy)

Pelanggaran maksim simpati terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pemuatan, yakni peserta pertuturan memperkecil rasa simpati dan memperbesar rasa antipati di antara mereka (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini biasanya disampaikan dengan tipikal tuturan yang mengekskresikan antipati terhadap lawan tutur (*expressing antipathy to O*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 14 data pelanggaran maksim simpati. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 3 yang menyatakan:

“Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam diperjalanan masih macet, tadi kan udah diliatin ya, gitu.” (1:05-1:19) (Data 50)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 3 memberikan pembelaan yang justru memicu kontroversi di masyarakat. Ia menggunakan alasan kemacetan lalu lintas sebagai pembenaran atas tunjangan perumahan DPR. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim simpati karena anggota DPR 3 memperkecil rasa simpati dan memperbesar rasa antipati kepada masyarakat. Dengan menggunakan alasan kemacetan sebagai pembenaran atas tunjangan perumahan, ia dianggap tidak memiliki simpati terhadap masyarakat yang mengalami kendala serupa tanda adanya kompensasi dari pemerintah. Masyarakat menilai bahwa kemacetan adalah masalah semua lapisan masyarakat, sehingga pernyataannya dinilai hanya mementingkan kenyamanan DPR. Karena pernyataannya inilah, ia dinonaktifkan sebagai anggota DPR.

Sebagai temuan lainnya, pelanggaran maksim simpati juga terdapat pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

Wartawan: *“Tapi kalau dikaitkan dengan krisis gitu, dengan kondisi fiskal sekarang sebenarnya ada kenaikan gaji dan gimana kalau...?” (2:38-2:42)*

Anggota DPR 2: *“Gaji tidak ada naik. Gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta hampir 7 juta. Tunjangan-tunjangan beras, kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 (juta) kalau gak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta, 5 juta sebulan, Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulanya.” (2:43-3:19) (Data 32)*

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 2 seolah-olah ingin mengatakan “*gaji tidak naik, tapi tunjangan yang naik*”. Ia menyebutkan nominal-nominal tunjangan untuk memberikan kesan transparansi, tetapi yang ia bangun justru menjadi boomerang karena ia menutup pernyataannya dengan keluhan bahwa sebenarnya kenaikan tunjangan yang ia sebutkan masih belum cukup menutupi mobilitas DPR. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim simpati karena anggota DPR 2 gagal menunjukkan simpati kepada masyarakat. Wartawan menyinggung soal “krisis” dan “kondisi fiskal”, tetapi ia mengabaikan hal itu. Ia justru merinci nominal 12 juta untuk tunjangan beras dan 7 juta untuk tunjangan bensin. Bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi nominal tersebut adalah hal yang tidak masuk akal. Ia gagal menunjukkan rasa simpati dan justru memperlihatkan kesejahteraannya sebagai wakil rakyat di tengah penderitaan rakyat. Tuturan ini

menjadi salah satu penyebab eskalasi demonstrasi karena dianggap tunjangan yang diberikan tidak masuk dan terlalu besar untuk seorang wakil rakyat di saat rakyatnya justru sedang mengalami krisis ekonomi.

Maksim Perasaan (*Feeling Reticence*)

Pelanggaran maksim perasaan terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pematuhan, yakni penutur memaksakan perasaan dan tidak bersimpati kepada lawan tutur (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini biasanya disampaikan dengan tipikal tuturan menggerutu (*grumbling*) dan mengeluh (*grousing*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 14 data pelanggaran maksim perasaan. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

“Kalau dikalikan 1 bulan, dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok. Kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu.” (0:33-1:09) (Data 27)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 2 berupaya memberikan pembenaran atas tunjangan 50 juta yang diberikan. Ia membangun narasi biaya hidup tinggi di Senayan dengan membandingkan estimasi biaya sewa selama 26 hari kerja yang totalnya mencapai 78 juta. Dengan itu, ia ingin menciptakan kesan bahwa tunjangan tersebut bukanlah kemewahan, melainkan masih kurang jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah di Senayan. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim perasaan karena anggota DPR 2 menyampaikan tuturan dengan tipikal mengeluh. Ia menggunakan kata “nombok” untuk menunjukkan perasaan merasa rugi di depan masyarakat. Ia mengeluh bahwa sebenarnya tunjangan yang diberikan tidak mencukupi. Bukannya bersyukur, ia justru mengeluh dengan tunjangannya yang dianggap “tekor”.

Sebagai temuan lainnya, pelanggaran maksim perasaan juga terdapat pada tuturan anggota DPR 6 yang menyatakan:

Pembawa Acara: *“Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa itu semua dikerjakan oleh anggota DPR?”* (22:22-22:24)
 Anggota DPR 6: *“Faktanya memang dikerjakan karena rancangan undang-undang tersebut itu masuk dalam Prolegnas utama dan pada saat ini dan saya sudah 10 bulan di DPR malah saya jadi capek sendiri rapatnya, tuh.”* (22:25-22:38) (Data 108)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 merasa terpojok oleh pertanyaan pembawa acara yang meragukan apakah DPR benar-benar bekerja. Untuk mematahkan keraguan tersebut, ia tidak menggunakan testimoni pribadi sebagai anggota dewan yang baru menjabat 10 bulan. Ia menjadikan rasa capek sebagai bukti otentik bahwa proses legislasi sedang berjalan dengan intensif. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim perasaan karena anggota DPR 6 mengeluhkan kelelahan fisiknya secara personal di tengah perdebatan mengenai rasa ketidakadilan yang dialami masyarakat. Ia merasa sudah memberikan pengorbanan fisik yang cukup, sehingga ia merasa berhak untuk mengeluh.

Maksim Permintaan Maaf (*Obligation S to O*)

Pelanggaran maksim permintaan maaf terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pematuhan, yakni penutur tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau meminta maaf kepada lawan tutur (Leech, 2014). Tuturan yang melanggar maksim ini disampaikan dengan tipikal tuturan yang menahan ucapan terima kasih dan permintaan maaf (*withholding thanks or apologies*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, hanya ditemukan 2 data pelanggaran maksim permintaan maaf pada tuturan anggota DPR 1. Sebagai berikut:

“Nah, tapi untuk spesifik yang gua sampein bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek. yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’ Enggak ada itu bahasa gue.” (0:34-0:48) (Data 12)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 menyadari bahwa kata “tolol” yang ia ucapkan menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat. Ia kemudian meluruskan bahwa ada kesalahpahaman

antara apa yang ia ucapkan dengan apa yang ditafsirkan oleh masyarakat. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim permintaan maaf karena anggota DPR 1 tidak meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Pernyataannya yang menganggap bahwa orang yang memberikan tuntutan agar DPR dibubarkan adalah orang tertolol sedunia. Hal itu berdampak besar bagi eskalasi demonstrasi, bahkan aksi penjarahan. Namun, melalui pernyataan tersebut ia tidak menunjukkan rasa bersalah kalau ia punya andil dalam peristiwa itu dan tidak meminta maaf atas ucapannya.

“Nah, spesifik yang gua katakan adalah orang yang mengatakan bubar. Siapa misalnya? karena si wartawan kan enggak ngucapin siapa yang bicara. Maka dari itu gua sampein itu. Nah, itulah bahwa orang menafsirkan salah kata yang akhirnya digoreng, yang tidak sesuai.” (0:49-1:09) (Data 13)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 1 mencoba menjelaskan alasan di balik ucapannya. Ia berargumen bahwa karena wartawan tidak menyebutkan nama spesifik siapa yang meminta DPR bubar, maka ia merespons secara umum. Ia juga menyalahkan pihak luar (netizen/media) yang dianggap menggoreng atau memelintir ucapannya sehingga maknanya menjadi salah di mata publik. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim permintaan maaf karena anggota DPR 1 tidak meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Pernyataannya yang menganggap bahwa orang yang memberikan tuntutan agar DPR dibubarkan adalah orang tertolol sedunia. Hal itu berdampak besar bagi eskalasi demonstrasi, bahkan aksi penjarahan. Namun, melalui pernyataan tersebut ia tidak menunjukkan rasa bersalah kalau ia punya andil dalam peristiwa itu dan tidak meminta maaf atas ucapannya.

Maksim Berpendapat (*Opinion Reticence*)

Pelanggaran maksim berpendapat terjadi jika tuturan bertolak belakang dari prinsip pematuhan, yakni penutur menyampaikan pendapatnya dengan tidak santun dan terkesan memaksakan pendapatnya. Tuturan yang melanggar maksim ini biasanya disampaikan dengan tipikal tuturan yang terkesan mengunggulkan pendapat sendiri atau menganggap pendapat sendiri lebih kuat (*being opinionated*) (Leech, 2014). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 9 data pelanggaran maksim berpendapat. Misalnya, ditemukan pada tuturan anggota DPR 6 yang menyatakan:

Pembawa Acara: “Anda mengatakan salah hitungnya di mana?” (8:37-8:38)
 Anggota DPR 6: “Ya, karena rilnya tidak seperti itu yang kami terima. Tidak seperti itu. Jauhlah. jauh di bawah dari 230 juta seperti data yang disampaikan oleh Fitrah.” (8:39-8:49) (Data 91)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 6 menyadari apabila ia menyebut angka pasti, masyarakat tetap akan menghujatnya karena angka itu masih jauh di atas upah minimum. Oleh karena itu, ia bersikap defensif dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pembawa acara adalah data yang salah. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim berpendapat karena anggota DPR 6 merasa pendapatnya paling benar. Dengan mengatakan “Tidak seperti itu. Jauhlah. jauh dibawah dari...”, ia terkesan merasa paling benar dan menganggap bahwa sumber yang diberikan oleh pembawa acara itu data yang salah tanpa memberikan data pembandingan yang valid. Ia tidak membuka ruang diskusi, melainkan langsung mennggap bahwa pendapatnya yang paling benar.

Sebagai temuan lainnya, pelanggaran maksim berpendapat juga terdapat pada tuturan anggota DPR 2 yang menyatakan:

“Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu.” (3:39-4:02) (Data 34)

Konteks tuturan di atas, anggota DPR 2 mengaitkan kenaikan harga beras dan telur untuk membenarkan kenaikan tunjangan. Ia mengakhiri penjelasannya dengan ekspresi syukur dan terima kasih atas kenaikan tunjangan tersebut. Tuturan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim berpendapat karena anggota DPR 2 memberikan opini subjektif. Dengan menarasikan kenaikan tunjangan sebagai bentuk “belas kasihan” dari Menteri Keuangan, ia seolah memvalidasi bahwa lembaga DPR layak dikasihani di tengah krisis ekonomi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, ditemukan dinamika kesantunan berbahasa anggota DPR dalam merespons kebijakan tunjangan dan demonstrasi tahun 2025. Dari 13 video yang melibatkan 7 anggota DPR sebagai subjek, diperoleh 265 tuturan dengan tingkat pematuhan maksim kesantunan mencapai 61%, sementara tingkat pelanggaran sebanyak 39%. Dari presentase tersebut, diketahui bahwa tuturan anggota DPR 3, 4, 5, dan 7 lebih dominan pada pematuhan maksim kesantunan berbahasa. Sedangkan, tuturan anggota DPR 1, 2, dan 6 lebih dominan pada pelanggaran. Berdasarkan keseluruhan data, maksim kesepakatan menjadi maksim yang paling dominan dipatuhi, sedangkan maksim kerendahan hati menjadi maksim yang paling dominan dilanggar. Adapun rincian dari hasil temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Maksim Kesantunan Berbahasa

No.	Pematuhan			Pelanggaran		
	Maksim	Jumlah Temuan	Presentase	Maksim	Jumlah Temuan	Presentase
1.	Kearifan	69	21,43%	Kearifan	29	14,22%
2.	Kedermawanan	11	3,42%	Kedermawanan	23	11,27%
3.	Pujian	2	0,62%	Pujian	14	6,86%
4.	Kerendahan Hati	23	7,14%	Kerendahan Hati	59	28,92%
5.	Kesepakatan	108	33,54%	Kesepakatan	40	19,61%
6.	Simpati	23	7,14%	Simpati	14	6,86%
7.	Permintaan Maaf	12	3,73%	Permintaan Maaf	2	0,98%
8.	Pemberian Maaf	-	-	Pemberian Maaf	-	-
9.	Perasaan	4	1,24%	Perasaan	14	6,86%
10.	Berpendapat	70	21,74%	Berpendapat	9	4,41%
	Total	322	100%	Total	204	100%

Tinggi tingkat pematuhan maksim kesantunan yang mencapai 61% dengan dominasi pada maksim kesepakatan menunjukkan bahwa anggota DPR tersebut menghasilkan tuturan-tuturan yang menyepakati pendapat atau poin-poin yang disampaikan oleh lawan tutur guna meminimalkan perselisihan. Hal ini sejalan dengan teori Leech, (2014) bahwa maksim kesepakatan mengharuskan penutur memperbesar kesepakatan dan memperkecil ketidaksepakatan dengan lawan tutur. Dengan demikian, dominasi pematuhan maksim kesepakatan terjadi karena anggota DPR memilih untuk menyampaikan argumen yang sejalan dengan lawan tuturnya.

Di sisi lain, terdapat pelanggaran maksim kesantunan sebesar 39% yang didominasi oleh maksim kerendahan hati. Dalam hal ini, tuturan yang disampaikan oleh 7 anggota DPR tersebut cenderung memperlihatkan status jabatan, besarnya tanggung jawab kerja, dan kelayakan finansial atau fasilitas mereka. Ditinjau dari teori (Leech, 2014), pelanggaran maksim kerendahan hati terjadi penutur dan lawan tutur tidak merendahkan diri sendiri dan memperbesar pujian untuk diri sendiri. Leech, (2014) menambahkan pada pelanggaran maksim ini biasanya tuturan disampaikan dengan tipikal tuturan yang membanggakan diri (*boasting*) dan merasa puas diri (*being complacent*). Tindakan para anggota DPR yang menyampaikan tuturan yang menonjolkan status jabatan besarnya beban kerja, dan kelayakan finansial atau fasilitas secara otomatis melanggar maksim kerendahan hati.

Secara keseluruhan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa para anggota DPR dalam merespons kebijakan tunjangan dan demonstrasi tahun 2025 ditandai dua kecenderungan yang bertolak belakang. Di satu sisi, wujud tuturan mereka memperlihatkan kesepahaman verbal, yang dibuktikan dengan dominasi pematuhan maksim kesepakatan. Namun, di sisi lain, tuturan mereka merefleksikan kecenderungan untuk menonjolkan diri, sehingga berpotensi melanggar maksim kerendahan hati. Munculnya, kedua sisi ini menandakan bahwa pematuhan dan pelanggaran maksim kesantunan dalam sebuah komunikasi dapat muncul secara bersamaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 265 data tuturan dari tujuh anggota DPR terkait isu kenaikan tunjangan dan demonstrasi 2025, dapat disimpulkan bahwa tuturan tujuh anggota DPR tersebut menghadirkan kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa. Dengan rincian, tuturan lebih dominan pada pematuhan maksim kesantunan berbahasa dengan total 322 data pematuhan maksim

berbanding 204 data pelanggaran maksim. Tingginya angka pematuhan terdapat pada maksim kesepakatan dengan total 108 data. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan bahasa santun oleh anggota DPR menjadi upaya untuk memperkecil perselisihan karena perbedaan pandangan antara anggota DPR dan masyarakat. Namun, meskipun didominasi oleh pematuhan maksim kesantunan, ada sisi lain anggota DPR yang masih sering menonjolkan dirinya. Hal tersebut terlihat dari dominannya pelanggaran maksim kerendahan hati dengan total 59 data. Selain pelanggaran maksim kerendahan hati, adapula pelanggaran maksim lainnya, yakni 29 data pelanggaran maksim kearifan, 23 data pelanggaran maksim kedermawanan, 14 data pelanggaran maksim pujian, 40 data pelanggaran maksim kesepakatan, 14 data pelanggaran maksim simpati, 14 data pelanggaran maksim perasaan, dan 9 data pelanggaran maksim berpendapat. Hal ini menjadi catatan penting karena sekecil apapun pelanggaran kesantunan berbahasa jika dituturkan oleh anggota DPR akan berdampak pada dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arma, D. K., & Katubi. (2022). *Tindak Tutur dan Kesantunan* (M. Aditiawarman, Ed.; 1st ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Eliana, & Junaidi. (2023). Kesantunan Berbahasa dalam Lingkungan Keluarga Anggota Dewan H. Zulfahmi Zulham, ST. MT (Kajian Maksim Goffrey Leech). *Ameena Journal*, 1(1), 111–119.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Pernama, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Pena Persada.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit UNM.
- Leech, G. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Penerjemah, M.D.D. Oka; Pendamping Setyadi Setyapranata (UI-Press).
- Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. Oxford University Press.
- Mae. (2025). *Ini 7 Kontroversi Anggota DPR yang Picu Kemarahan Masyarakat*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250830181344-128-662900/ini-7-kontroversi-anggota-dpr-yang-picu-kemarahan-masyarakat>
- Mahsun. (2017). *Metode Penelitian Bahasa Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajawali Pers.
- Marizal, Y. (2025). Kesantunan Berbahasa Gubernur Maluku Utara dalam Podcast “Curhat Bang Denny Sumargo.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 3725–3732.
- Median. (2025). *Pers Rilis Median Bedah Persepsi Publik Terhadap Unjuk Rasa Agustus-Sept & Isu Kontemporer*. <https://www.median.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Rilis-Survei-Median-Persepsi-Demo-22-Sept-2025.pdf>
- Mulyani, S. (2023). Kesantunan Berbahasa Novel Rindu Karya Tere Liye serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra di SMA. *REFEREN*, 2(2). <https://doi.org/10.22236/referen.v2i2.13294>
- Mulyono. (2020). Kesantunan Berbahasa Politisi dalam Acara Debat di Live Streaming Video #KupasTuntas. *Jurnal Pena Indonesia*, 6(2), 23–33.
- Nartin, Faturrahman, Deni, A., Santoso, Y. H., Paharuddin, Suacana, I. W. G., Indrayani, E., Utama, F. Y., Tarigan, W. J., & Eliyah. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. T. Cahyono, Ed.). Cendikia Mulia Mandiri.
- Niswasani, & Juita, N. (2019). Kesantunan Berbahasa Pejabat Legislatif/Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat dalam Media Sosial. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 6(4). <https://doi.org/10.24036/81046040>
- Norvitasari, P. A., Putri, S. A., & Jasmine, T. T. (2023). *Anotasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Panducita, G., Farikah, & Wahyono, H. (2024). Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Tindak Tutur Menteri dan Anggota DPR dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Tahun 2022. *Jurnal DIDACTIQUE Bahasa Indonesia*, 5(1), 61–69. <https://doi.org/10.52333/didactique.v5i1.454>
- Pramujiono, A., Suhari, Rachmadtullah, R., Indrayanti, T., & Setiawan, B. (2020). *Kesantunan Berbahasa, Pendidikan Karakter, dan Pembelajaran yang Humanis* (R. Pujiastuti, Ed.). Indocamp.

- Pratamanti, E. D., Riana, R., & Setiadi, S. (2018). Kesantunan Berbahasa dalam Pesan WhatsApp Mahasiswa yang Ditunjukkan Kepada Dosen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(2), 230–239. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i2.984>
- Putri, R. R., Devi, Rizky Wika Shintya, Razib, R., & Sudarto. (2026). Dari Candaan ke Krisis: Atribusi Tanggung Jawab Publik terhadap Pernyataan Pejabat Negara dalam Pandemi COVID-19. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v4i1.2086>
- Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2016). *Pragmatik Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa* (S. Saat & W. Hardani, Eds.). Erlangga.
- Rahmayanti, I. (2025). *Pragmatik Digital Konsep Umum dan penjelasan dalam Konteks Digital* (D. Y. Lumah, Ed.). UHAMKA Press.
- Rahmayanti, I., Rokhman, F., Mardikantoro, H. B., & Pristiwati, R. (2025). Language, strategy, and influence: a pragmatic analysis of Indonesian YouTube influencers and their impact on social media. *Cogent Arts and Humanities*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2531180>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.; 1st ed.). KBM Indonesia.
- Sobari, I., & Fauziah, M. (2025). Implikasi Status Sosial dalam Gaya Berbahasa Pejabat Publik di Media Massa. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(4), 199–208. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2122>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantatif, Kualitatif, dan R&D* (29th ed.). Alfabeta.
- Sumarno, & Wakaimbang, H. (2022). *Kesantunan Berbahasa di Ruang Publik Sebuah Analisis Wacana Pragmatik* (D. R. Rizkian, Ed.; 1st ed.). Diva Pustaka.
- Syafruddin. (2018). *Membangun Bahasa Santun* (S. S. Rimang, Ed.; 1st ed.). Dialektika.
- Yusuf, N., & Hafriana, N. (2025). Analisa Kesantunan Berbahasa Anggota DPR RI Terhadap Rakyat Indonesia pada Tahun 2025. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2457–2466.